

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Majid (2019), Anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti “sebuah tas kecil”. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjaabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Anggaran sektor publik menjadi instrument kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi, hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian, agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Anggaran sektor publik menjadi penting karena anggaran sektor publik sebagai alat bagi organisasi untuk mengarahkan pembangunan social-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatasi dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Menurut Yuesti (2020). Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran sektor public merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan

program – program yang dibiayai dengan uang politik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor public dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Menurut Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Daerah yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang – undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Menurut Rusdi (2018). Pemerintah daerah adalah suatu organisasi sektor publik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang dapat mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat, termasuk pengelolaan fiscal daerah dengan memakai hasil pengelolaan tersebut agar dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada dan adapt meningkatkan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal

apabila penyelenggaran urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada Undang – undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dimana besarnya disesuaikan, diatur dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semuanya sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan keuangan yang disusun oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD )yang telah disetujui oleh legislatif di tetapkan dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006. Problem penyusunan anggaran terus di hadapi oleh eksekutif. Anggaran merupakan perencanaan keuangan dan kegiatan, anggaran yang kurang umum, efisien, relevan dengan *ouput/outcome* yang direncanakan, sehingga tidak kelancaran pelaksanaan kegiatan anggaran, sedangkan pada saat pelaksanaan anggaran problem yang dihadapi adalah penyimpangan dari jadwal/rencana kegiatan, dan penyerapan yang rendah, cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran.

Menurut Yuesti (2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap

masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Jannah (2024), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki tugas dan wewenang yaitu Membentuk Peraturan Daerah Bersama Bupati, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bupati, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dikelompokkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan APBD, dan tahap pertanggung jawaban. Anggaran

merupakan aspek terpenting dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik, dan oleh sebab itu dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran yang baik. Dalam hal ini, DPRD harus pintar dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana Laporan Realisasi Anggaran Tahun anggaran sebelum terjadinya Pandemi Covid - 19 dan tahun setelah terjadinya Pandemi Covid - 19 sebagai perbandingannya, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanah Datar”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja periode sebelum terjadinya Pandemi Covid – 19 dan setelah terjadinya Pandemi Covid – 19 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Laporan Realisasi Anggarannya
2. Bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran periode sebelum terjadinya Pandemi Covid – 19 dan sesudah terjadinya Pandemi Covid – 19 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Magang**

### **1.3.1 Tujuan Magang**

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana anggaran dan realisasi periode sebelum terjadinya Pandemi Covid – 19 dan sesudah terjadinya Pandemi Covid - 19, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum
2. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja periode sebelum terjadinya Pandemi Covid – 19 dan sesudah terjadinya Pandemi Covid - 19 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

### **1.3.2 Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang ini Antara lain:

a. Bagi penulis

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai laporan realisasi anggaran.
2. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan dan menambah pengalaman serta pengetahuan, wawasan di lingkungan kerja.
3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
4. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.

b. Bagi instansi

Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi/perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis. Perusahaan/ Instansi dapat melihat tenaga kerja potensial dikalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan/instansi membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

c. Bagi universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah perbendaharaan referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan Laporan ini yaitu:

1. Teknik Penarikan Sample

Teknik penarikan yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penulis memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap dan mengetahui secara mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang dipilih sebagai informan adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan keadaan Laporan Realisasi Anggaran yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat ditemukannya fakta ataupun realitas yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini.

### b) Wawancara atau interview

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dalam ilmu sosial data juga dapat diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara pembicaraan informal, yaitu pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar belakang alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam

suasana biasa dan wajar. Sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.

c) Telaah dokumen

Yakni teknik pengumpulan data yang mempelajari dokumen, literature lain, ataupun berbagai bahan yang berasal dari DPRD Kabupaten Tanah Datar

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pada kegiatan magang ini penulis memilih Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tempat magang dengan waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari kerja. Dimulai pada 09 Januari sampai dengan 03 Maret 2022.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah menerangkan tentang susuna dari penulisan ini sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci dan sistematika penulisan ini memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh. Sistematika dalam laporan terdiri dari 5 bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan magang.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan Landasan Teori yang berhubungan dengan anggaran pemerintah meliputi perihal mencakup tentang anggaran,

jenis-jenis anggaran, dan lain sebagainya, anggaran pendapatan belanja daerah.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini diuraikan tentang Profil Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanah Datar. Bagian ini menjelaskan bagaimana kegiatan dalam kantor ini, tujuan, struktur organisasi serta bagaimana sejarah kantor secara umum.

**BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Pada bab ini membahas tentang penjelasan pelaksanaan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Laporan realisasi anggarannya

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang

